



**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 telah dapat diselesaikan sebagai salah satu kewajiban kami selaku kepala SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SOPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat unsur-unsur evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2016 dan perkiraan 2017 serta Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2018 yang bersinergi dengan penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 serta Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 .

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ( Renja ) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang - saran positif dari berbagai pihak.

Akhirnya, mudah - mudahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Bukittinggi, \_\_\_\_\_ 2017  
1438 H

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BUKITTINGGI**

dto

**Ir. OKTAVIANUS, MT**  
**Nip. 19631030 199202 1 001**

# DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018</b>	
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1.1
1.2. Landasan Hukum	1.2
1.3. Maksud dan Tujuan	1.4
1.4. Sistematika Penulisan	1.4
<b>BAB II           EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016</b>	2.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 201 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021	2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	2.11
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum	2.14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi	2.15
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	2.16
<b>BAB III          TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016</b>	3.1
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	3.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018	3.2
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018	3.5
<b>BAB IV          PENUTUP</b>	4.1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 terjadi beberapa perubahan landasan yuridis yang cukup mendasar diantaranya acuan RPJMD dan Renstra yang berpedoman kepada visi misi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 serta perubahan urusan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang terkait pekerjaan umum, perumahan permukiman dan penataan ruang serta perencanaan pembangunan berubah menjadi pekerjaan umum, penataan ruang serta pertahanan .

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi serta tetap mengacu kepada rancangan awal RKPD, rancangan Renstra, serta rancangan RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja.
- **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menselaraskan hasil Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan juga kota serta musrenbang Propinsi Sumatera Barat dan juga nasional.
- **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kebijakan dan program prioritasnya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** dimana hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, Kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan perumusan tujuan dan sasaran untuk melahirkan program dan kegiatan dengan indikator kinerja serta dana indikatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanian.

Hasil penyusunan program/kegiatan akan disinkronkan dengan kebijakan prioritas dan program/kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sebagai bentuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 );
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- y. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- z. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- aa. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018;
- bb. Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Nomor 37/DPUPR/VII/2017 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016-2021;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran mengenai Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada tahun 2018 serta perkiraan maju untuk Tahun 2019.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi berdasarkan Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Penyampaian dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan Program/Kegiatan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian rencana kerja (RENJA) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- BAB I   Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.
- BAB II   Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD hal-hal dan capaian Renstra DKPD, Analisis Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.
- BAB III  Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang Terdiri dari telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
- BAB IV  Penutup.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- b) Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2016 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1  
CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2016

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.	
URAIAN	Indikator Sasaran					
1	2	3	4	5	6	
<b>Urusan Wajib Pekerjaan Umum</b>						
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan jalan dan trotoar di dalam sistem transportasi yang mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan	Porsentase/panjang jaringan lampu jalan, jalan, dan jembatan serta trotoar yang berkondisi mantap	80,40	57,63	71,68%	Dari Masukan
			80,40	61,42	76,40%	Dari Keluaran

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.	
URAIAN	Indikator Sasaran					
	kapasitas jalan dalam upaya peningkatan perekonomian/kesejahteraan					
2	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.	Porsentase/Luas jaringan irigasi yang berkondisi mantap.	95,71	47,38	49,50%	Dari Masukan
			95,71	54,29	56,72%	Dari Keluaran
3	Meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung mengurangi luas dan lama genangan.	Porsentase/ panjang drainase, talub/turab/bronjong yang berkondisi mantap.	98,33	75,23	76,51%	Dari Masukan
			98,33	84,86	86,30%	Dari Keluaran
4	Meningkatnya efektifitas gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat	Porsentase/jumlah gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan yang berkondisi mantap	100,00	91,83	91,83%	Dari Masukan
			100,00	100,00	100,00%	Dari Keluaran
<b>Urusan Wajib Perumahan</b>						
5	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana berbasis masyarakat.	Porsentase/Jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman	96,55	59,47	61,59%	Dari Masukan
			96,55	67,28	69,69%	Dari Keluaran
<b>Urusan Wajib Penataan Ruang</b>						

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.	
URAIAN	Indikator Sasaran					
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengurangan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan, dengan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW Kota Bukittinggi.	Perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW/struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi.	89,29	37,76	42,30%	Dari Masukan
			89,29	58,87	65,93%	Dari Keluaran
<b>TOTAL</b>			<b>93,38</b>	<b>61,55</b>	<b>65,91%</b>	<b>* Dari Masukan</b>
			<b>93,38</b>	<b>71,12</b>	<b>76,16%</b>	<b>* Dari Keluaran</b>

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata capaian

Dari tabel Capaian kinerja DPU tahun 2016 diatas jika dilihat secara keseluruhan capaian kinerja DPU dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 65,91% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluaran kegiatan capaian kinerja DPU tahun 2016 mencapai 76,16% dengan predikat sedang. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di Perubahan APBD seperti sisa – sisa DAK tahun berjalan lokasi yang tidak bebas, lokasi berada di fasilitas umum, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Secara rinci pencapaian sasaran masing-masing urusan ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan tingkat pencapaian indikator output masing-masing kegiatan. Capaian kinerja pada tingkat program dan kegiatan untuk Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN			
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7			
C	BELANJA LANGSUNG								
1	03	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM							
1	'03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	'03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (materai, perangko dan fax)	1 Tahun (materai 3000 : 100, materai 6000 : 600, perangko dan fax)	1 Tahun (materai 3000 : 100, materai 6000 : 600, perangko dan fax)	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan/pembayaran Jasa Komunikasi (telpon), Air dan Listrik Kantor dan Listrik PJU	1 Tahun	1 Tahun	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan/service dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional, alat berat, BBM, dan pengecatan menunjang kelancaran tugas kantor	1 Paket ( 4 minibus, 7 Pickup, 6 truck, 24 spd mtr)	1 Paket ( 4 minibus, 7 Pickup, 6 truck, 24 spd mtr)	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Orang	4 Orang	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Komputer, 32 Laptop, dan 32 Printer	22 Komputer, 32 Laptop, dan 32 Printer	100%	
1	'03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	72 item	72 item	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36 item barang cetak dan 166.725 lembar photocopy	36 item barang cetak dan 166.725 lembar photocopy	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 item	20 item	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1152 porsi makan, 812 porsi snack	1152 porsi makan, 812 porsi snack	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksana Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor DPU (Satpam)	4 org Satpam	4 org Satpam	100%	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 01 28	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS + BPJS	60 org	60 org	100%	
1 '03 01 31	Pelaksanaan Proses Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Peneliti Kontrak	121 paket pekerjaan	121 paket pekerjaan	100%	sesuai honorarium yang dibutuhkan
1 '03 01 34	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTK , Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola, Pengawas Keg. Swakelola, dan Pengelola Administrasi Kegiatan	121 paket pekerjaan	121 paket pekerjaan	100%	sesuai honorarium yang dibutuhkan
<b>1 '03 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
1 '03 02 03	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabilitasi/Lanjutan pembangunan Kantor Dinas PU + Interior dan Landscape dapat terlaksana	5 unit	5 unit	100%	
1 '03 02 09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor (komputer dan printer)	4 unit komputer, 5 unit printer	4 unit komputer, 5 unit printer	100%	
<b>1 '03 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
1 '03 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya	145 stel	132 stel	100%	
<b>1 '03 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
1 '03 06 05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	sesuai kebutuhan
1 '03 06 07	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	sesuai kebutuhan
1 '03 06 17	Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2010-2015	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2015-2020	-	-	-	
1 '03 06 19	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	Tersedianya Laporan keuangan dan prognosis 6 Bulan	6 laporan	6 laporan	100%	
<b>1 '03 15</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>					
1 '03 15 01	Peningkatan Trotoar	Terlaksananya Peningkatan Trotoar	1 paket (1000 M')	1 paket (1000 M')	100%	
1 '03 15 02	Pembangunan Trotoar	Terlaksananya Pembangunan Trotoar	7 paket	7 paket	100%	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 15 03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Peningkatan Jalan Dalam Kota	1 paket (400M)	1 paket (400M)	100%	
1 '03 15 04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Pembangunan Jalan Dalam Kota	400 M'	400 M'		
1 '03 15 05	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	3 paket	3 paket	100%	
1 '03 17	<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>					
1 '03 17 01	Pemasangan Batu Bronjong	Terlaksananya Pemasangan Batu Bronjong	50 M'	50 M'	100%	
1 '03 17 02	Pemasangan / Pembangunan Dam	Terlaksananya pemasangan/pembangunan Dam	1175 M'	1175 M'	100%	
1 '03 18	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>					
1 '03 18 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Rutin Jalan Dalam Kota	180.17 Km	180.17 Km	100%	
1 '03 18 02	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Kota	31 buah	31 buah	100%	
1 '03 18 03	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Trotoar dalam Kota	22,346 Km	22,346 Km	100%	
1 '03 20	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>					
1 '03 20 02	Penyusunan DED Pengembangan SPAM Ngarai Sianok	Tersedianya dokumen DED Pengembangan SPAM Ngarai Sianoki	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 20 04	Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksananya proses pemberdayaan + penyediaan tenaga fasilitator lapangan (TFL)	4 orang TFL + 14 Kegiatan	4 orang TFL + 14 Kegiatan	100%	
1 '03 20 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK 2016)	Terlaksananya DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK 2016)/pemasangan pipa	588 HDPE + 618 PVC	588 HDPE + 618 PVC	100%	
1 '03 20 06	DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	Terlaksananya DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (DAK 2016) – Pembuatan Septic Tank	4 Paket	4 Paket	100%	
1 '03 20 07	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	Terlaksananya pembuatan sumur bor	1 paket (50 Meter)	1 paket (50 Meter)	100%	
1 '03 20 08	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)	Terlaksananya pendampingan Kegiatan DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)/Pemasangan pipa	1 Paket	1 Paket	100%	
1 '03 20 09	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016) – Pembuatan septictank	4 Septictank	4 Septictank	100%	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	'03 21	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>				
1	'03 21 01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Lampu PJU	3000 titik	3000 titik	100%
1	'03 21 02	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	45 titik	45 titik	100%
1	'03 21 03	Event-Event Daerah dan Nasional	Terlaksananya penunjang event daerah/nasional	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
1	'03 21 04	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di TMP	7000 M2	7000 M2	100%
1	'03 21 05	Penyusunan Perwako (RTH) dan RTNH	Terlaksananya Penyusunan Perwako (RTH) dan RTNH	2 Perwako (RTH dan RTNH)	2 Perwako (RTH dan RTNH)	100%
1	'03 21 06	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Terlaksananya Penyusunan RTBL Kawasan Prioritas Kota Pusaka Bukittinggi	1 kawasan	1 kawasan	100%
1	'03 22	<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>				
1	'03 22 01	Rehab Balai Pemuda	Terlaksananya Rehab Balai Pemuda Campago Ipuah	100 M2	100 M2	100%
1	'03 22 02	Pembangunan Gapura / Gerbang	Terlaksananya Pembangunan Gapura / Gerbang	5 lokasi	5 lokasi	100%
1	'03 22 04	Rehab Kantor Lurah	Terlaksananya rehab kantor lurah Tengah Sawah	1 paket	1 paket	100%
1	'03 22 05	Review Revitalisasi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur TajungKang	Tersusunnya dokumen Review Revitalisasi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur TajungKang	1 Paket	1 Paket	100%
1	'03 22 06	Perencanaan Pembangunan Pasar Penampungan Pedagang Pasar Bawah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar Penampungan Pedagang Pasar Bawah	1 Paket	1 Paket	100%
1	'03 22 07	Pembangunan Posyandu	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Posyandu	1 paket	1 paket	100%
1	'03 22 08	Pembangunan Kantor Lurah	Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah	4 Kantor Lurah (1344 M2)	4 Kantor Lurah (1344 M2)	100%
1	'03 23	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>				
1	'03 23 01	Pendamping Kegiatan P2KP	Terlaksananya Pendampingan P2KP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
1	'03 23 02	Pendampingan kegiatan BSPS	Terlaksananya Pendamping Kegiatan BSPS	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
1	'03 23 03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan terhadap pelaku usaha Jasa Konstruksi			100%

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN	
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1	'03 25	<b>Program Pengendalian Banjir</b>					
1	'03 25 01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Terlaksananya Pengendalian Banjir	9,831 Km	9,831 Km	100%	sesuai kebutuhan
1	'03 25 03	Pembuatan Sumur Resapan untuk Penanggulangan Banjir	Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan untuk Penanggulangan Banjir	1 paket	1 paket	100%	
1	'03 26	<b>Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur</b>					
1	'03 26 01	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD Dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD Dengan Nilai Kecil dari 100 Juta	130 paket	130 paket	100%	
1	'03 26 02	Penyediaan basis data dan informasi infrastruktur perkotaan	Tersedianya dokumen basis data dan informasi perkotaan	1 dokumen (24 kelurahan)	1 dokumen (24 kelurahan)	100%	
1	'03 26 03	Revisi Masterplan Drainase Kota Bukittinggi	Tersedianya Revisi Masterplan Drainase Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1	'03 26 04	Penyusunan Jakstrada Kota Bukittinggi	Tersedianya dokumen Jakstrada Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1	'03 26 05	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	1 dokumen per Triwulan	1 dokumen per Triwulan	100%	
1	'03 26 06	Operasional Perda Bangunan Gedung	Terlaksananya Operasional Perda Bangunan Gedung	3 TABG, 15 SLF sederhana dan 3 SLF Non sederhana	3 TABG, 15 SLF sederhana dan 3 SLF Non sederhana	100%	
1	'03 26 07	Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittinggi	Tersedianya Dokumen Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen		
1	04	<b>URUSAN WAJIB PERUMAHAN</b>					
1	04 16	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>					
1	'04 16 02	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Terlaksananya Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	16 paket	16 paket	100%	
1	'04 16 03	Pembangunan Riol	Terlaksananya Pembangunan Riol	3 Paket	3 Paket	100%	
1	'04 16 04	Rehab/Peningkatan Riol	Terlaksananya rehab/peningkatan riol	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'04 16 04	DAK Perumahan dan Pemukiman (DAK 2015)	Terwujudnya DAK Perumahan dan Pemukiman (DAK 2015)	1 Paket	1 Paket	100%	
1	05	<b>URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG</b>					
1	05 15	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>					
1	'05 15 02	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota	350 PKRK	350 PKRK	100%	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN	
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1	'05 15 03	Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	50 sertifikat	50 sertifikat	100%	
1	'05 15 04	Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	2 perda	2 perda	100%	
1	'05 15 07	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya cetak peta tata ruang	1 peta	1 peta	100%	
1	'05 15 08	Pendataan Bangunan	Tersedianya Dokumen Pendataan Bangunan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1	05 17	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>					
1	'05 17 01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	1 tahun monitoring + pengaduan masyarakat	1 tahun monitoring + pengaduan masyarakat	100%	sesuai kebutuhan
1	'05 17 02	Audit Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Audit ketaatan Pemanfaatan Ruang terhadap dokumen tata ruang	1 dokumen RTRW	1 dokumen RTRW	100%	
1	06	<b>URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					
1	06 16	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	'06 16 22	Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	1 perda RTRW dan 2 Perda RDTR terdampingi	1 perda RTRW dan 2 Perda RDTR terdampingi	100%	sesuai kebutuhan
1	'06 16 23	DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	Terwujudnya penyusunan DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	1 paket/1 dokumen	0	100%	Gagal tender
1	'06 16 24	DED Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		<b>GRAND TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>					

Dari segi realisasi keuangan realisasi belanja Dinas pekerjaan Umum Pada Tahun 2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2015) dimana persentase realisasi adalah menurun dari tahun 2015 yang hanya 68,15%. Untuk belanja tidak langsung terealisasi 96,35% dan belanja langsung 66,44% yang menurun dari Tahun 2015 yaitu sebesar 68,36%.

Tabel 2.3  
Target dan Realisasi Keuangan DPU Tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH	111.257.785.914,36	75.821.014.621,00	68,15
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.353.148.015,36	6.121.139.265,00	96,35
2.1.1	Belanja Pegawai	6.353.148.015,36	6.121.139.265,00	96,35
2.2	BELANJA LANGSUNG	104.904.637.899	69.699.875.356	66,44
2.2.2	Belanja Pegawai	2.451.606.500,00	1.942.931.000,00	79,25
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	38.672.999.674,00	25.789.163.680,00	66,69
2.2.4	Belanja Modal	63.780.031.725,00	41.967.780.676,00	65,80

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2015 yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam **lampiran 1** Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2017 ini.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari sistem perencanaan Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional dimana diperlukan sinergitas dalam pencapaian prioritas pembangunan antara daerah/kota dengan prioritas provinsi dan nasional. Komitmen ini terlihat dari penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilakukan oleh daerah sesuai dengan target minimal IKK yang harus dicapai dalam kurun waktu penerapan.

**Profil pemenuhan pencapaian/kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami perubahan standar yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Disamping itu terkait dengan pelaksanaan pelayanan bidang perumahan rakyat diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu Rumah layak huni dan terjangkau; serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Untuk mengukur/menganalisis capaian kinerja pelayanan minimal yang terkait Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan laporan SPM dimaksud dapat diuraikan berikut:

### 1. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- a. Pelayanan Sumber Daya Air;** Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat
- 1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

Tersedianya kapasitas sumber daya air yang dimiliki PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2012 untuk melayani 80% jumlah penduduk administratif sebagaimana target MDGs yaitu 90.855 jiwa, adalah sebesar 199 lt/detik. Sedangkan kapasitas sumber daya air yang seharusnya dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk adalah 274 lt/detik. Capaian ini didapat dari adanya ketersediaan air pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

- 2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada  
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sampai tahun 2014 sebesar 458 lt/dtk atau 99,56%. Dengan target 100% capaian kinerja indikator ini termasuk kategori sangat berhasil. Untuk luas areal realisasi tanam di Kota Bukittinggi merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian.

#### **b. Pelayanan Jalan;**

##### **▪ Jaringan :**

- 1) Aksesibilitas :

Pada tahun 2015, tidak ada rencana penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2015 ini sepanjang 194,22 kilometer. Jika dibandingkan dari tahun 2011 hingga 2015 tidak terjadi penambahan ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan. Hal ini disebabkan Kota Bukittinggi tidak ada rencana penambahan ruas jalan, dan hanya menganggarkan perbaikan, peningkatan ataupun rehabilitasi jalan yang ada.

- 2) Mobilitas :

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Target pada tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi adalah 80% dan realisasi sebesar 71,34%. Realisasi ini sama dari tahun 2010, hal ini disebabkan tidak terjadi penambahan ruas jalan selama tahun tersebut.

- 3) Keselamatan :

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dan laik fungsi.

##### **▪ Ruas :**

- 1) Kondisi Jalan :

Kondisi jalan ditentukan oleh kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan. Kondisi jalan ini harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. Target tersebut

dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan. Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan.

2) Kecepatan :

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Kriteria kecepatan ini adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya. Nilai SPM berdasarkan prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah.

Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. Target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan. Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan

**c. Pelayanan Air Minum**

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Pada pelayanan air minum dengan jaringan perpipaan, untuk tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi adalah sebesar 120.491 jiwa. Jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2016 adalah 53.076 jiwa sesuai dengan target 43% yang tercantum dalam Dokumen SPAM.

**d. Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan)**

1) Air Limbah Permukiman

- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang dioleh dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan dan sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target capaian jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman pada tahun 2015 adalah 89% dan realisasi 82%. Realisasi dari tahun 2011 hingga 2015 tidak terjadi peningkatan karena Kota Bukittinggi belum memiliki unit pengolahan tinja atau IPLT. Begitupun juga dengan kendaraan operasional, masyarakat Bukittinggi masih mengandalkan kendaraan operasional dari pihak swasta.

- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota untuk indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Sanitasi Lingkungan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan MCK untuk kapasitas 20-25 KK. Sedangkan untuk sistem air limbah skala kawasan atau kota Kota Bukittinggi baru melakukan kegiatan pembangunan pada tahun 2013 yang berlokasi pada kelurahan Belakang Balok. Sesuai dengan rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum 2010-2015 target infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman adalah 89% pada tahun 2014.

2) Drainase

- Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

- genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota. Definisi Operasional tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaan, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh pemerintah yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Target capaian prosentase atau panjang drainase, talub/turap/bronjong dan riol sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2014 adalah 87%. Indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong dan peningkatan, pemeliharaan drainase.

**e. Penataan Bangunan dan Lingkungan**

1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

SPM Penataan Bangunan dan Lingkungan (IMB) bertujuan untuk meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2016 adalah 433 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM.

2) Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) harus tersedia di kabupaten/kota sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Definisi

Operasional Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m<sup>2</sup> pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat.

Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kota Bukittinggi, indikator ini dilaksanakan dengan Penyusunan Buku Standart Harga Bangunan Negara yang dilakukan setiap tahunnya, sehingga realisasi 100%.

**f. Jasa Konstruksi**

1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

IUJK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Sesuai dengan SOP pada KPPT waktu penerbitan IUJK adalah 6 hari. Jumlah permohonan IUJK yang masuk sebanyak 35 izin atau realisasi 100%, dengan menerbitkan IUJK sebanyak 35 Izin.

2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi. Hingga tahun 2015 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya.

**g. Penataan Ruang**

1) Informasi Penataan Ruang

Indikator dari Informasi Penataan Ruang adalah tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Informasi berupa Peta Analog dan Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog dan Peta Digital disebarluaskan melalui berita di media massa. Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

Kota Bukittinggi pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 6 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

2) Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR

Pelibatan peran masyarakat berupa konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program penataan ruang sebagai bentuk participatory planning yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkau aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Aur Biugo Tigo Baleh, dan Konsultansi Publik untuk penyusunan Dokumen Revisi RTRW.

3) Izin Pemanfaatan Ruang

Indikator dari izin pemanfaatan ruang adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2015 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2011, sehingga pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan.

4) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Indikatornya berupa terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari

Untuk merealisasikan SPM ini, kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari pengaduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, 80% dapat ditangani.

2. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat.

a. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

SPM ini merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu. SPM ini merupakan perbandingan jumlah lingkungan yang didukung PSU dengan jumlah lingkungan perumahan.

Tabel 2.4

Profil Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2017.

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket	
			Indikator	Nilai					
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2015	71.7%	71.7%	
			2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2015	99.56	99.56	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket		
			Indikator	Nilai						
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2015	100.00	100.00	
			Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2015	71.51	71.51	
			Keselamatan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2015	80.22	80.22	
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2015	80.22	80.22	
			Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2015	80.22	80.22	
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari			38.91	38.91	
		Sangat buruk				40%	2015			
		Buruk				50%				
		Sedang				70%				
		Baik				80%				
		Sangat Baik				100%				
IV	Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan)	Air Limbah		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2015	82.39	82.39	
				10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2015	0.00	0.00	
		Drainase		13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2015	43.41	43.41	
				13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2015	37.08	37.08	
V	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan		15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2015	0	0	Target oleh B2TPM
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	2015	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket	
			Indikator	Nilai					
VI	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2015	100	100	
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2015	0	0	belum tersedianya Sitem Informasi Jasa Kontruksi
VII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19.1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2015 Kab. /Kota	0	0	Sedang dlm Revisi RTRW
				100%	2015 Kecamatan	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW	
				100%	2015 (Kelurahan)	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW	
			19.2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital	100%	2015 Kab. /Kota	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
				100%	2015 Kecamatan	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW	
				100%	2015 (Kelurahan)	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW	
		20.1	Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR	100%	2015	40	40	Perda RTRW telah disahkan pada tahun 2011, tahun 2015 dalam penyusunan RDTR dan Revisi RTRW
				20.2	Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.	100%	2015	60	60
		Izin Pemanfaatan Ruang	21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2015 (Kabupaten /Kota)	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket	
			Indikator	Nilai					
		Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2015 (Kab. /Kota dan Kecamatan)	73.13	73.13	

### 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image dan masyarakat (budaya). Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam penentuan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, dan efisiensi pemerintah. Berdasarkan word economic forum 2008-2009, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dengan demikian maka tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing daerah dalam konteks regional dapat membaik.

Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana membangun infrastruktur yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota, menguarai kemacetan di pusat Kota, penyediaan RTH dan mengatasi banjir/genangan di beberapa kawasan strategis Kota, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, dimana Kota Bukittinggi sebagai Kota yang mempunyai beragam fungsi mesti bisa menyelaraskan struktur dan pola ruang dengan rencana pembangunan infrastruktur kota yang diharapkan akan menciptakan keseimbangan lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Selain itu penyediaan infrastruktur bukan hanya untuk Penduduk Kota Bukittinggi namun juga untuk melayani masyarakat sekitarnya, karena faktanya terdapat peningkatan jumlah penduduk pada siang hari sekitar 3 s/d 4 kali lipat dari jumlah penduduk malam hari sebagai penduduk yang tercatat dalam administrasi Kota.

Menghadapi tantangan diatas maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dapat mendukung ekonomi kota secara efektif dan efisien. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan, yaitu bagaimana menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Isu lainnya adalah perlu adanya perhatian serius tahun kedepan adalah pentingnya seluruh aparatur ke PU an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang

disokong secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas birokrasi dan mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima dan meningkatkan inovasi dalam ke PU an mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan maupun pelaporan serta pemahaman yang kuat terhadap TUPOKSI masing-masing aparaturnya.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan i

nfrastruktur di Kota Bukittinggi adalah kendala alamiah berupa wilayah geografis Kota yang hanya seluas 25,239 Km<sup>2</sup> dengan luas potensial pembangunan hanya sebesar 80% (selebihnya kawasan lindung ngarai) serta karakter lahan yang pada umumnya dimiliki oleh kaum adat sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembebasan lahan sehingga menjadi salah satu kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan rancangan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2017 yang mengacu kepada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, terdapat 2 (dua) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum saat ini.

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan</b>					
Fasilitas Sosial yang memenuhi standar lingkungan Pemenuhan target universal access (air minum)	% fasilitas sosial yang representative dan memenuhi standar lingkungan (Puskesmas, Sekolah, Pasar, Taman Rekreasi) 1. % air minum layak 2. % kawasan kumuh	70.50% 90,64%	90% 100%	1. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas sosial yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas sosial 3. pengembangan sistem air minum perpipaan	1. Melakukan kerjasama dengan instansi / dunia usaha 2. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana parasarana fasilitas sosial yang mendukung keindahan kota 3. Menyiapkan sistem pengelolaan fasilitas umum secara elektronik
					4. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih 5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum 6. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					7. Menyediakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan
	% sanitasi layak	93,12%	100%	1. ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar, berupa drainase dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase</li> <li>2. memperkuat kelembagaan AMPL/ Pokja Sanitasi</li> <li>3. mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat</li> <li>4. meningkatkan cakupan layanan air limbah melalui pembangunan perpipaan dan IPAL terpusat</li> <li>5. mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup</li> <li>6. pemeliharaan sarana dan prasarana drainase</li> <li>7. mengembangkan gerakan sungai bersih</li> </ol>
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan penataan ruang kota</b>					
Pengendalian pemanfaatan ruang kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW</li> <li>2. % pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi geo spasial</li> <li>2. Optimalisasi penegakan PERDA tata ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menerapkan sistem informasi spasial berbasis web</li> <li>2. Memaksimalkan peran dan fungsi PPNS</li> <li>3. Pembentukan satgas pengendalian tata ruang</li> </ol>

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu</b>					
Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1. % jalan berkondisi baik	100%	100%	1. pengembangan prasarana jalan	1. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa program dan kegiatan SKPD merupakan kompilasi dari mekanisme/prinsip perencanaan teknokratis, politis, top down dan bottom up. Mekanisme bottom up yang dilakukan berupa menjangking usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun 2017 sesuai wewenang dan tugas fungsi ke PU an. Proses penjangking usulan ini telah dilakukan secara berjenjang semenjak dari musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota dengan serangkaian diskusi dan tinjauan lapangan sehingga menghasilkan usulan yang benar-benar prioritas dan layak serta dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bukittinggi yang disejalankan dengan kebijakan politis kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mensinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan nasional dan sektoral lainnya seperti RPIJM.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut setelah dilakukan berbagai proses penjangking dan pembahasan dikompilasikan kedalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kompilasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat

KODE									URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
1	'01	03	1	01	03	01	15		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	15	01	Peningkatan Trotoar	
1	'01	03	1	01	03	01	15	02	Pembangunan Trotoar	
									Pembuatan bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh Depan Kantor Lurah sampai depan Masjid Jami' Kelurahan Pakan Labuah	Pakan Labuah / Dlm proses Identifikasi
									Pembuatan Trotoar RW II RT 3,9,5 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah / Dlm proses Identifikasi
1	'01	03	1	01	03	01	15	03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	
								-	Peningkatan jalan aspal beton di Jl. Sertu Kamaruddin RT II RW I	Sapiran / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan ulang jalan Prof. Hazairin RW I (simpang yarsi) s/d Jl. Kehakiman RW II (Mesjid Al Barkah Belakang Balok) Kelurahan Belakang Balok	Belakang Balok / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan Jalan Kumango/depan soto H. Minah Kelurahan Benteng Pasar Atas	Benteng Pasar Atas / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan ulang RT 02/RWII, RT 04/RW II, RT 01/RW III jangkak	Campago Ipuah / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan Jalan Munggu Terapung RW 2 RT 4, 5,6 RW I RT 05 Kubu gulai bancah	Kubu gulai bancah / Dlm proses Identifikasi
								-	Pelebaran Jalan Flamboyan RT 04/RW 04 Kelurahan Campago Guguk Bulek	Campago Guguk Bulek / Dlm proses Identifikasi
								-	Rehabilitasi Jalan Kirab Remaja RT 02/RW 05 Kelurahan Puhun Tembok	Puhun Tembok / Dlm proses Identifikasi
1	'01	03	1	01	03	01	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	
								-	Pembangunan Jalan Dalam Kota	

								-	Pengaspalan Jalan Kantor DPRD	
								-	Pembuatan jalan ke SDN 13 Bukik Sangkuik RT 03 RW IV Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukit Apit Puhun / Dlm proses Identifikasi
								-	Rehab Jalan Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	15	06	Pembangunan Jembatan	
								-	Pembangunan Box Culvert	
									Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	16	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	
									- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (tersebar/dok. masterplan drainase	
									- Lanjutan Pembangunan Bandar dan Trotoar (dari RW V sampai ke RW IV depan Pasa Pagi Birugo) Kelurahan Birugo	Birugo/ Dlm proses Identifikasi
									- Pembangunan Pintu Air Permanen (Bandar Nagari) RT2, RW II Kelurahan Birugo	Birugo/ Dlm proses Identifikasi
									- Pembuatan bandar/drainase jalan bermawi dari simpang tigo baleh s/d depan mushalla nurul bilad kapalo koto Kelurahan Pakan Labuah	Pakan Labuah/ Dlm proses Identifikasi
									- Pembangunan Drainase RW II RT 4,5,6,7 RW I RT 9 Samping Mesjid Nurul Wathan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Gulai Bancah/ Dlm proses Identifikasi

									- Pembuatan drainase dari simpang Kapalo Kota ke Arah Tambuo	
									- Perbaiki saluran drainase dan gorong-gorong di jalan sumua ladang cakah RT 03 RW 01	
									- Pembuatan sumur resapan di Komp. MTSN 2 Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	16	02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	16	03	Peningkatan Drainase	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	17	01	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	
1	'01	03	1	01	03	01	17	02	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	18	01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	18	02	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	
1	'01	03	1	01	03	01	18	03	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>22</b>		<b>Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	22	03	Leger Jalan Kota Bukittinggi	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>23</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	23	01	Pengadaan alat-alat berat	
1	'01	03	1	01	03	01	23	02	Pemeliharaan Alat Berat	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>24</b>		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan</b>	

									<b>Pengairan Lainnya</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	24	02	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	
1	'01	03	1	01	03	01	24	03	Pemeliharaan Rutin Irigasi	
1	'01	03	1	01	03	01	24	04	Perencanaan DAK Irigasi	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>26</b>		<b>Program Pengembangan, Pengelolaan &amp; Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	26	01	Normalisasi Sungai	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>27</b>		<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	27	11	Pembangunan Toilet Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	27	11	Pembuatan Sumur Bor	
									Pemasangan pipa dan penampungan air (Pokir)	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>28</b>		<b>Program Pengendalian Banjir</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	28	01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>31</b>		<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	31	01	Event-Event Daerah dan Nasional	
1	'01	03	1	01	03	01	31	02	Pembangunan Kantor Lurah	
1	'01	03	1	01	03	01	31	03	Rehab Kantor Lurah	
1	'01	03	1	01	03	01	31	32	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	
1	'01	03	1	01	03	01	31	34	Rehab Gedung parkir Eks Gloria (Lanjutan)	
1	'01	03	1	01	03	01	31	35	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I ( Pertama)	
1	'01	03	1	01	03	01	31	35	Pembangunan Gapura	

<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>32</b>		<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	32	01	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>33</b>		<b>Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	33	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	33	02	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	33	03	Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	33	04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>34</b>		<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	34	03	Pembinaan Jasa Konstruksi	
1	'01	03	1	01	03	01	34	04	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	
				01	03	01	34	04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>36</b>		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36	05	Pengadaan cetak peta tata ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36	06	Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
1	'01	03	1	01	03	01	36	07	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36	04	RTBL Kawasan Strategis	

1	'01	03	1	01	03	01	36	13	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	36	14	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	
<b>1</b>	<b>'01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>37</b>		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	37	01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Audit Pemanfaatan Ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	
<b>1</b>	<b>'02</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	
1	'02	04	1	01	03	01	16	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	
1	'02	04	1	01	03	01	16		Sosialisasi Pengadaan Tanah	
1	'02	04	1	01	03	01	16	02	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	
<b>1</b>	<b>'02</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	
1	'02	04	1	01	03	01	17	01	Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya	
<b>1</b>	<b>'02</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Pengembangan Sistim Informasi Pertanahan</b>	
1	'02	04	1	01	03	01	18		Kegiatan Pembuatan Sistim Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pembuatan Aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan
1	'02	04	1	01	03	01	18	01	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Arsip Elektronik

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

##### Tinjauan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

#### 1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2014-2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Standar, SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan pertimbangan beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 sulit diimplementasikan dan diukur maka telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota meliputi jenis pelayanan dasar Sumber Daya Air, Jalan, Cipta karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dengan batas waktu pencapaian Tahun 2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1

**SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota**  
(lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014)

No.	Jenis Pel. Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
<b>A. Sub Bidang Sumber Daya Air</b>					
	1. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	a. persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100%
			b. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70%
<b>B. Sub Bidang Jalan</b>					
	1. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	%	60%
	2. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	%	100%
<b>C. Sub Bidang Cipta Karya</b>					
	1. Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	81,77%
	2. Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase)	a. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%

No.	Jenis Pel. Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
		permukiman perkotaan			
			b. persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%
			c. persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%
			d. persentase pengoperasian TPA	% pengope. TPA	60%
			e. persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	50%
	3. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	IMB	60%
	4. Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	10%
<b>C. Sub Bidang Jasa Konstruksi</b>					
	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	60%
	2. Izin Usaha Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100%
<b>D. Sub Bidang Tata Ruang</b>					
	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi tata ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100%
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	50%

## 2. Bidang Perumahan Rakyat

Terkait Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah maka kewenangan Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### Tinjauan Kebijakan 100-0-100.

Target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PU adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 dimana target tersebut adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Target tersebut secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat

maupun di daerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Hal ini telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menjadikan target adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak tersebut menjadi indikator kinerja utama RPJMD yang pelaksanaannya dijabarkan dalam renstra dan renja SKPD termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021.**

Penyusunan rencana kerja SOPD Tahun 2017 merupakan Tahun kedua perencanaan dalam periodisasi RPJMD Tahun 2016-2021, dimana RPJMD Kota Bukittinggi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi acuan masih dalam proses penyusunan.

▪ *Tinjauan Visi dan Misi serta Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.*

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu "TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA".

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. *Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;*
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu "*Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;* dengan prioritas pembangunan "Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur".

▪ *Tinjauan Rancangan Renstra DPU 2016-2021.*

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah merumuskan rancangan renstra dengan visi : “Terwujudnya Infrastruktur Kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan berwawasan lingkungan”.

Visi tersebut didukung dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;
3. Meningkatkan Penataan Ruang Kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan.

Tabel 3.3  
Rancangan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
<b>1.</b>	<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an</b>					
	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan internal dan eksternal PU	1. Lancarnya pelayanannya internal dan eksternal dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tingkat kelancaran administrasi perkantoran tiap tahunnya</b>
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti/dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung</b>
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan
					Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape
					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat ketsediaan pakaian dinas</b>
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas</b>
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
					Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
					Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi
		2. Meningkatnya ketersediaan peralatan dan sarana penunjang	Tingkat ketersediaan alat berat dan sarana/prasarana ke PU an		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
					Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
<b>2.</b>	<b>MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik</b>					
	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Jalan dan penunjangnya dalam mendukung pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	1. Meningkatnya ketersediaan (kuantitas) serta kualitas jalan dan jembatan bangunan pelengkapya	Persentase tingkat kondisi jalan dan jembatan dengan kondisi baik/ sedang		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik</b>
					Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan
					Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun
					Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan
					Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun
					Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab
					Pembangunan Box Culvert Pengecoran bahu/ badan jalan Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Perencanaan DAK Jalan	Jumlah box culvert yang dibangun Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor Jumlah DED yang disusun Jalan 2 jalur yang dibangun Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjalan
					<b>Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan</b>
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin
					<b>Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum</b>	<b>Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap</b>
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar
					<b>Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan</b>	<b>Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan</b>
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi
	2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Penurunan Jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	<b>Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik</b>
					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun
					Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
					Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
					Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
					<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase Pengurangan titik genangan</b>
					Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
					Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
					<b>Program Pengembangan, Pengelolaan &amp; Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya</b>	<b>Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi</b>
					Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi
					<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>	<b>Persentase Pengamanan titik bahaya longsor</b>
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
	3. Meningkatkan sarana dan prasarana irigasi dan sungai	1. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk pertanian rakyat	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Persentase DI yang beririgasi teknis</b>
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
	4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya pemeliharaan teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Jumlah gedung yang layak fungsi		<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>	<b>jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum</b>
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali
					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>	<b>Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi</b>
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
	5. Menyelenggarakan keterpaduan/ sinergi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	1. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi		<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi</b>
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
					Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	
6.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	1. Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	
			persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai			persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	
					Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat	
					Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi	
					Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara	
					Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun	
					Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi	
					Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi	
					Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun	
					Pembangunan IPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun	
					Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana	
					Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat	
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	
		Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas				
3.	<b>MISI 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota</b>						
1.	Peningkatan penataan ruang (ketaatan terhadap dokumen tata ruang).	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas serta pengelolaan Ruang Publik dan Terbuka Hijau	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah		Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	
						Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksanannya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
						Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
						Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
					Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
					Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang
					Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksanannya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
					Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang
					RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun
					Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan
					Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata
					Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan
					Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang
		2. Meningkatnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Ketaatan terhadap tata ruang</b>
					Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
					Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun
					Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat
					Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan
4.	<b>Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan , dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan</b>					
	1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase ketersediaan informasi pertanahan		<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	<b>Persentase ketersediaan informasi pertanahan</b>
					Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksanannya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan
					Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
		2. Selesaiannya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Jumlah konflik pertanahan pemerintah daerah yang diselesaikan		<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah</b>
					Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan
	2. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1. Terlaksananya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum		<b>Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah</b>
					Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan
					Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi
					Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah

### 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang secara substansi merupakan usaha untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bukittinggi menjadi masyarakat yang berekonomi mapan. Berdasarkan hal tersebut maka pada umumnya program dan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah kegiatan-kegiatan dalam upaya memberikan akses dan penunjang untuk peningkatan perekonomian tersebut, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, drainase dan lain-lain.

Namun selain berdasarkan upaya untuk pencapaian visi kepala daerah tersebut, kegiatan dan program yang akan diselenggarakan merupakan penjabaran dari beberapa dokumen perencanaan yang ada seperti RTRW, RPIJM, Master Plan Drainase, Dokumen RP4D, maupun dokumen perencanaan lainnya. Namun hal yang paling penting adalah kegiatan dan program ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai acuan pelayanan dalam jangka menengah (lima tahun).

Sebagai penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan strategis yang sebagian besar berdasarkan kegiatan bottom up sesuai usulan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang tahun 2017 pada tataran kelurahan, kecamatan dan penyaringan melalui musrenbang kota yang diselaraskan dengan usulan dari SKPD dan usulan strategis lainnya serta mensinergikan dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan urusan ini akan disesuaikan kembali dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa terkait dengan urusan wajib pekerjaan umum dan

penataan ruang nomenklaturnya berubah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berupa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Namun karena operasional aturan terkait belum tersedia berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, maka dalam dokumen perencanaan ini masih memakai nomenklatur lama.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, direncanakan akan memuat 17 program strategis, yang terangkum dalam 2 urusan yaitu, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan, dengan akumulasi program dan kegiatan yang ditampung dalam renja sebagaimana tabel berikut;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017 serta Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta bersinergi dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 serta Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2016 – 2021 disamping mensinkronkan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan menjadi bahan pembahasan Musrenbang Kota dengan mengkompilasikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknoratis, politis, partisipatif serta top down dan bottom up. Untuk itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan anggaran (DPA) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebagai pedoman program kegiatan serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pertanahan yang taat azas sesuai konsep penataan ruang dalam menunjang Bukittinggi sebagai kota wisata, pendidikan, perdagangan dan jasa.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BUKITTINGGI**

**dto**

**Ir. OKTAVIANUS, MT**  
Nip. 19631030 199202 1 001

**MATRIK RANCANGAN PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

KODE									URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	Lokasi	Target		kebutuhan dana	Sumber dana	16	Lokasi	Target	Kebutuhan dana	Sumber dana											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																																	
<b>Misi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an.</b>																																	
1	'01	03	1	01	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			2,999,209,040		-	Bukittinggi	100%	3,299,129,944															
1	'01	03	1	01	03	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Bukittinggi	5 Jenis	6,050,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	6,655,000	APBD														
1	'01	03	1	01	03	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening belanja jasa kantor	Bukittinggi	12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet	236,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	259,600,000	APBD														
1	'01	03	1	01	03	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Bukittinggi	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	405,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	445,500,000	APBD														
1	'01	03	1	01	03	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan	Bukittinggi	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis	182,799,600	APBD	-	Bukittinggi	100%	201,079,560	APBD														
1	'01	03	1	01	03	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	Bukittinggi	3 item, 6 jenis	21,242,500	APBD	-	Bukittinggi	100%	23,366,750	APBD														

1	'01	03	1	01	03	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	59 Jenis	41,316,440	APBD	-	Bukittinggi	100%	45,448,084	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	Bukittinggi	16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	46,290,850	APBD	-	Bukittinggi	100%	50,919,935	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	Bukittinggi	13 jenis	8,998,840	APBD	-	Bukittinggi	100%	9,898,724	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	28,950,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	31,845,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	12 bulan	187,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	205,700,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS dibayar	Bukittinggi	41 orang	1,108,003,700	APBD	-	Bukittinggi	100%	1,218,804,070	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	Bukittinggi	1 paket (6 orang)	197,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	216,700,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bukittinggi	126 Paket	380,435,900	APBD	-	Bukittinggi	100%	418,479,490	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Bukittinggi	126 Paket	150,121,210	APBD	-	Bukittinggi	100%	165,133,331	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>100,000,000</b>					<b>110,000,000</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 gedung	100,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	110,000,000	APBD

006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	59 Jenis	41,316,440	APBD	-	Bukittinggi	100%	45,448,084	APBD
007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	Bukittinggi	16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	46,290,850	APBD	-	Bukittinggi	100%	50,919,935	APBD
008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	Bukittinggi	13 jenis	8,998,840	APBD	-	Bukittinggi	100%	9,898,724	APBD
009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	28,950,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	31,845,000	APBD
010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	12 bulan	187,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	205,700,000	APBD
011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS dibayar	Bukittinggi	41 orang	1,108,003,700	APBD	-	Bukittinggi	100%	1,218,804,070	APBD
012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	Bukittinggi	1 paket (6 orang)	197,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	216,700,000	APBD
013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bukittinggi	126 Paket	380,435,900	APBD	-	Bukittinggi	100%	418,479,490	APBD
019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Bukittinggi	126 Paket	150,121,210	APBD	-	Bukittinggi	100%	165,133,331	APBD
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>100,000,000</b>					<b>110,000,000</b>	
006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 gedung	100,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	110,000,000	APBD

1	'0	03	1	01	03	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian				<b>84,500,000</b>		-			<b>92,950,000</b>		
1	'01	03	1	01	03	01	05	003	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peserta yang mengikuti bimtek/diklat ke Puan	Bukittinggi	15 orang		84,500,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	92,950,000	APBD	
<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																					
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik</b>														<b>108,659,073,555</b>					<b>119,524,980,911</b>		
1	'0	03	1	01	03	01	15		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik</b>				<b>12,362,276,590</b>	APBD				<b>13,598,504,249</b>	APBD	
1	'01	03	1	01	03	01	15	001	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket		740,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	814,000,000	APBD	
1	'01	03	1	01	03	01	15	002	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang ditingkatkan	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 14 paket		8,076,419,550	APBD		Bukittinggi	100%	8,884,061,505	APBD	
1	'01	03	1	01	03	01	15	003	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket		1,459,224,550	APBD		Bukittinggi	100%	1,605,147,005	APBD	
1	'01	03	1	01	03	01	15	004	Pembangunan Jembatan P4B	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan,	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan		95,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	104,500,000	APBD	
1	'01	03	1	01	03	01	15	006	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 5 paket		1,991,632,490	APBD		Bukittinggi	100%	2,190,795,739	APBD	

1	'01	03	1	01	03	01	15	003	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket	1,459,224,550	APBD		Bukittinggi	100%	1,605,147,005	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	004	Pembangunan Jembatan P4B	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1	95,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	104,500,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	006	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 5 paket	1,991,632,490	APBD		Bukittinggi	100%	2,190,795,739	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	16		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong</b>	<b>Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik</b>			<b>2,986,548,360</b>	<b>APBD</b>				<b>3,285,203,196</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	16	001	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	1,833,552,360	APBD		Bukittinggi	100%	2,016,907,596	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	16	003	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 paket	1,152,996,000	APBD		Bukittinggi	100%	1,268,295,600	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	17		<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>	<b>Persentase titik pengamanan bahaya longsor</b>			<b>1,131,150,300</b>					<b>1,244,265,330</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	17	001	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/ dam bangunan dibangun	Bukittinggi	4 dokumen perencanaan, 4 laporan pengawasan, 4 paket	1,081,150,300	APBD		Bukittinggi	100%	1,189,265,330	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	17	00	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/ dam jalan dibangun	Bukittinggi	1 paket	50,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	55,000,000	APBD
1	'0	03	1	01	03	01	18		<b>Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik</b>			<b>14,339,202,860</b>				<b>15,773,123,146</b>	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	744,156,235	APBD	Bukittinggi	100%	818,571,859	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	Jembatan Dalam Kota yang direhab dan dipelihara	Bukittinggi	12 Bulan	364,656,350	APBD	Bukittinggi	100%	401,121,985	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	284,390,275	APBD	Bukittinggi	100%	312,829,303	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2018)	Lap. Pengawasan, Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2018), Peta GIS dan Data Base	Bukittinggi	1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2018), 1	12,946,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	14,240,600,000	APBD
1	'0	03	1	01	03	01	20		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan</b>	<b>Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinamargaan</b>			<b>547,150,000</b>				<b>601,865,000</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	20	00	Pemeliharaan Alat Berat	Alat berat yang dipelihara	Bukittinggi	12 unit	547,150,000	APBD	Bukittinggi	100%	601,865,000	APBD
1	'0	03	1	01	03	01	21		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan</b>	<b>Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi</b>			<b>1,891,117,275</b>				<b>2,080,229,003</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	21	00	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/ ditingkatkan	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 6 paket	1,538,798,000	APBD	Bukittinggi	100%	1,692,677,800	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	21	002	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	297,319,275	APBD	Bukittinggi	100%	327,051,203	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	21	004	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Panjang saluran Irigasi yang di rehab	Bukittinggi	65 m	55,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	60,500,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik</b>			<b>1,502,000,000</b>				<b>1,652,200,000</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	23	001	Pembangunan Toilet Umum	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, toilet umum	Bukittinggi	2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan, 2 unit toilet	1,000,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	1,100,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23	002	Pembuatan Sumur Bor	Sumur bor yang dibuat	Bukittinggi	1 paket	30,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	33,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23	004	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum ( DAK Air Minum 2018)	Dokumen perencanaan, Dokumen pengawasan, Jaringan SPAM	Bukittinggi	1 Dokumen perencanaan, 1 Dokumen pengawasan, 2 Jaringan SPAM	442,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	486,200,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23	005	Pembangunan Bak Penampungan Air	Bak penampungan air	Bukittinggi	1 bak penampungan air	30,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	33,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	24		<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik</b>			<b>348,221,650</b>				<b>383,043,815</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	24	001	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	kali/sungai yang dibersihkan dan dikeruk	Bukittinggi	2000 m	223,221,650	APBD	Bukittinggi	100%	245,543,815	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	24	002	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, bak resapan	Bukittinggi	1 Dokumen perencanaan, 1 dokumen pengawasan, 1 bak resapan	125,000,000	APBD	Bukittinggi	100%	137,500,000	APBD

01	03	01	25		Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum			68,399,786,305					75,239,764,936	
01	03	01	25	001	Event-Event Daerah dan Nasional	jumlah event daerah yang dilaksanakan	Bukittinggi	5 even	87,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	95,700,000	APBD
01	03	01	25	002	Pembangunan Kantor Lurah	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang	Bukittinggi	3 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 3 paket	4,100,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	4,510,000,000	APBD
01	03	01	25	003	Rehab Kantor Lurah	Jumlah Kantor lurah yang direhab	Bukittinggi	1 paket	70,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	77,000,000	APBD
01	03	01	25	004	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan)	Bukittinggi	1 laporan pengawasan, 1 unit Bangunan (lanjutan)	4,432,700,575	APBD		Bukittinggi	100%	4,875,970,633	APBD
01	03	01	25	006	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I ( Pertama)	Dokumen manajemen konstruksi, bangunan kantor DPRD Kota	Bukittinggi	1 dokumen manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD	28,245,085,730	APBD		Bukittinggi	100%	31,069,594,303	APBD
01	03	01	25	008	Pembangunan Gapura	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gapura yang dibangun	Bukittinggi	2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan, 2 unit	300,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	330,000,000	APBD
01	03	01	25	009	Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Dokumen DED, Amdal, Amdal Lalin, Managemen Konstruksi	Bukittinggi	Dok. Revisi MP & DED, 2 Dok Amdal, 1 Dok MK	6,165,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	6,781,500,000	APBD
01	03	01	25	010	Rehabilitasi Kawasan Jam Gadang	Pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi kawasan jam gadang	Bukittinggi	1 Pengawasan berkala, 1 lap. pengawasan, 1 revitalisasi kawasan jam gadang	25,000,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	27,500,000,000	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	26		<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>	<b>Persentase Gedung negara dan swasta yang laik fungsi</b>							<b>131,898,350</b>					<b>145,088,185</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	26	001	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	Bukittinggi	9 kali sidang, 18 SLF	131,898,350	APBD		Bukittinggi	100%	145,088,185					APBD
1	'01	03	1	01	03	01	27		<b>Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan</b>	<b>Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap</b>			<b>4,881,930,365</b>									<b>5,370,123,402</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	27	001	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan Pemeliharaan Lampu PJU	Bukittinggi	12 bulan	374,095,630	APBD		Bukittinggi	100%	411,505,193					APBD
1	'01	03	1	01	03	01	27	002	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jaringan JPU	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	877,834,735	APBD		Bukittinggi	100%	965,618,209					APBD
1	'01	03	1	01	03	01	27	003	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Pembayaran rekening PJU	Bukittinggi	12 bulan	3,630,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	3,993,000,000					APBD
1	'01	03	1	01	03	01	28		<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada</b>			<b>137,791,500</b>									<b>151,570,650</b>	

1	'01	03	1	01	03	01	28	001	Pembinaan Jasa Konstruksi	peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek	Bukittinggi	120 orang	73,672,500	APBD		Bukittinggi	100%	81,039,750	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	28	002	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Bukittinggi	44 dokumen	47,824,000	APBD		Bukittinggi	100%	52,606,400	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	28	003	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Dokumen Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi yang disusun	Bukittinggi	4 dokumen	16,295,000	APBD		Bukittinggi	100%	17,924,500	APBD
<b>Misi 3. Meningkatkan Penataan Ruang Kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota</b>													<b>1,096,765,170</b>				<b>1,206,441,687</b>		
1	'01	03	1	01	03	01	30		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Meningkatnya kesesuaian pola ruang</b>			<b>670,319,585</b>			Bukittinggi	100%	<b>737,351,544</b>	
1	'01	03	1	01	03	01	30	001	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	960 orang, 24 kelurahan	131,505,500	APBD		Bukittinggi	100%	144,656,050	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	002	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	630 Orang	78,534,000	APBD		Bukittinggi	100%	86,387,400	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	003	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan penyusunan perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD	Bukittinggi	475 orang	170,897,830	APBD		Bukittinggi	100%	187,987,613	APBD

Misi 3. Meningkatkan Penataan Ruang Kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota											1,096,765,170					1,206,441,687			
1	'01	03	1	01	03	01	30		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang			670,319,585			Bukittinggi	100%	737,351,544	
1	'01	03	1	01	03	01	30	001	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	960 orang, 24 kelurahan	131,505,500	APBD		Bukittinggi	100%	144,656,050	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	002	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	630 Orang	78,534,000	APBD		Bukittinggi	100%	86,387,400	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	003	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan penyusunan perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD	Bukittinggi	475 orang	170,897,830	APBD		Bukittinggi	100%	187,987,613	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	004	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	Bukittinggi	40 Unit	26,250,000	APBD		Bukittinggi	100%	28,875,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	006	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Bukittinggi	300 KRK	60,156,625	APBD		Bukittinggi	100%	66,172,288	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	007	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Bukittinggi	20 Sertifikat	82,308,770	APBD		Bukittinggi	100%	90,539,647	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	008	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata	Bukittinggi	1 Dokumen	106,300,450	APBD		Bukittinggi	100%	116,930,495	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	009	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	Bukittinggi	1 kegiatan	14,366,410	APBD		Bukittinggi	100%	15,803,051	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	31		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan					426,445,585					469,090,144									
1	'01	03	1	01	03	01	31	001	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah Razia Bangunan	Bukittinggi	12 bulan			130,626,285	APBD					143,688,914	APBD							
1	'01	03	1	01	03	01	31	002	Audit Pemanfaatan Ruang	Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang yang tersusun	Bukittinggi	1 Dokumen			53,945,800	APBD		Bukittinggi	100%		59,340,380	APBD							
1	'01	03	1	01	03	01	31	003	Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	Billboard yang dibuat	Bukittinggi	3 Unit			200,000,000	APBD		Bukittinggi	100%		220,000,000	APBD							
1	'01	03	1	01	03	01	31	004	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi yang Intensif terhadap Penataan Ruang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018	Bukittinggi				41,873,500	APBD		Bukittinggi	100%		46,060,850	APBD							
<b>URUSAN PERTANAHAN</b>																													
<b>Misi 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan</b>																<b>17,628,278,840</b>							<b>19,391,106,724</b>						
1	'02	04	1	01	03	01	15		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tingkat ketersediaan informasi pertanahan					65,252,040						71,777,244								
1	'02	04	1	01	03	01	15	001	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data	Bukittinggi	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass			65,252,040	APBD		Bukittinggi	100%		71,777,244	APBD							
1	'02	04	1	01	03	01	16		Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah					17,131,867,790						18,845,054,569								

1	'02	04	1	01	03	01	15	00	1	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data	Bukittinggi	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass	65,252,040	APBD	Bukittinggi	100%	71,777,244	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16			<b>Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah</b>			<b>17,131,867,790</b>				<b>18,845,054,569</b>	
1	'02	04	1	01	03	01	16	00	1	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah yang	Bukittinggi	5 sertifikat	149,155,450	APBD	Bukittinggi	100%	164,070,995	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16	00	2	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi UU no. 2 tahun 2012 dan aturan turunannya	Bukittinggi	55 orang 1 hari	19,212,400	APBD	Bukittinggi	100%	21,133,640	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16	00	3	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota	Bukittinggi	2 paket	16,963,499,940	APBD	Bukittinggi	100%	18,659,849,934	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	17			<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	<b>Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan pengguna tanah</b>			<b>431,159,010</b>				<b>474,274,911</b>	
1	'02	04	1	01	03	01	17	00	1	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya	Masalah Tanah Konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat	Bukittinggi	1 kegiatan	431,159,010	APBD	Bukittinggi	100%	474,274,911	APBD
														<b>130,567,826,605</b>				<b>143,624,609,266</b>	

Bukittinggi, Desember 2017  
**ALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RU/**  
**KOTA BUKITTINGGI**

dto.

**Ir. OKTAVAINUS, MT**  
**NIP.19631030 199202 1 001**

